



Kemenkopolkam Apresiasi Kinerja Sutarmidji

SPIP dan APIP Seluruh Pemda Minimal Level Tiga

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) mendapat apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam RI), terkait peningkatan kualitas maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapa-

bilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah.

Seperti diungkapkan, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Kemko Polhukam RI Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo, bahwa pihaknya melaksanakan kunjungan kerja ke Kalbar untuk mendorong peningkatan khusus di bidang reformasi birokrasi. Di antaranya peningkatan kualitas SPIP dan APIP, reformasi birokrasi serta pelayanan publik.



... namun memang masih ada beberapa kabupaten yang perlu mendapat dorongan

Rus Nurhadi Sutedjo

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



TANDA TANGAN : Gubernur Kalbar Sutarmidji menandatangani hasil kesepakatan Rakor Antara Kemko Polhukam, Kemendagri, Kemenpan RB dan BPKP Perwakilan Kalbar di Data Analytic Room Kantor Gubernur, Rabu (26/2).



Kemenkopolkam Apresiasi Kinerja Sutarmidji

Sambungan dari halaman 1

"Kami melihat dan mengapresiasi Kalbar, bahwa dari penilaian sudah pada kategori B, namun memang masih ada beberapa kabupaten yang perlu mendapat dorongan," ungkapnya usai Rakor di Data Anlytic Room Kantor Gubernur, Rabu (26/2).

Ia yakin dengan kepemimpinan Gubernur Kalbar Sutarmidji, di tahun 2020 ini semua predikat penilaian bisa mencapai level yang baik. Sampai pada bidang pelayanan publik juga seluruhnya bisa berada di zona hijau. Untuk itu semua target yang dicanangkan diharapkan bisa tercapai.

"Saya percaya sepenuhnya dengan kepemimpinan gubernur Kalbar. Dan saya melihat dari visi misi beliau yang sangat baik, ada progres yang

baik walau pun masih ada beberapa daerah yang perlu didorong," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kalbar melakukan kesepakatan dengan Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenpan RB dan BPKP Perwakilan Kalbar. Ada tiga poin hasil kesepakatan yang ditandatangani bersama.

Pertama meningkatkan kualitas maturitas SPIP dan kapabilitas APIP terhadap Pemda yang masih belum mencapai level tiga, serta meningkatkan ke level berikutnya. Dengan target di tahun 2020 semua Pemda di Kalbar minimal berada di level tiga.

Lalu yang kedua membuat rencana aksi untuk meningkatkan reformasi birokrasi di Kalbar termasuk kabupaten/kota dalam jangka pendek

hingga menengah. Rencana aksi dituangkan dalam *roadmap* reformasi birokrasi di Kalbar periode 2020-2024, diselesaikan pada 2020.

Kemudian yang ketiga meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan penyelenggara sesuai Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan target tahun 2021 seluruh pelayanan publik Pemda di Kalbar sudah zona hijau.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, progres di Kalbar rata-rata terus mengalami peningkatan. Seperti kapabilitas APIP dikatakan sudah bagus. Kemudian layanan publik, jika yang lalu ada enam daerah di zona merah dan kuning, sekarang tinggal satu. Sementara yang lainnya sudah hijau.

"Kemudian yang lain-lain saya rasa tidak ada masalah, maturitas APIP-nya sudah delapan (daerah) yang level tiga. Dan saya berharap tahun ini semuanya sudah level tiga. Jadi target-target capaian kami, target yang perlu kerja keras, tapi saya rasa bisa," katanya.

Dalam tata kelola pemerintahan, layanan publik di Kalbar menurutnya juga terus mengalami progres atau kemajuan. Intinya ada pada kemauan di masing-masing daerah dan semua pihak harus saling mengingatkan.

"Jadi tidak ada yang tidak bisa. Nah saya yang nanti akan mengingatkan baik lewat media maupun tulisan surat ke pada Pemda yang ada. Beberapa Pemda kami minta ke BPKP untuk intens melakukan pendampingan," ujarnya. (bar)